

Tindak Tutur Perlokusi Warganet Terhadap Aksi Demonstrasi Tunjangan DPR di Instagram Kompas.com pada Agustus-September 2025

Fauziah Musfiroh ^{1,*}, Eko Muharudin ², Eko Suroso ³, Isnaeni Praptanti ⁴

¹⁻⁴ Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Indonesia;

¹ fauziahmusfiroh51@gmail.com; ² ekoayahkaisan@gmail.com; ³ ekosuroso36@gmail.com;

⁴ isnaenipump@gmail.com

*Fauziah Musfiroh

ARTICLE INFO

Article history

18-06-2026

Revised:

20-06-2026

Accepted:

21-07-2026

Keywords

*Perlocutionary Speech Acts,
Netizens, Instagram,
Demonstrations*

ABSTRACT

The rise of social media as a public communication space has led to social interactions occurring not only in person but also through various forms of discourse in the digital realm. Social media comment sections have become one of the ways the public participates by expressing their views on emerging social and political issues. This study was motivated by the diverse responses from netizens regarding the demonstrations over the House of Representatives' allowances, which revealed the use of language with specific intentions and impacts on readers. This study aims to describe the forms of perlocutionary speech acts found in netizens' comments and to explain the effects produced by these utterances. This study employs a qualitative approach using a descriptive method. The research data consists of utterances in netizens' comments on Kompas.com's Instagram posts related to the demonstrations against the DPR's allowances during the August-September period. Data collection was conducted through observation, followed by note-taking and sorting. Data analysis was performed using Searle's speech act theory by identifying the forms of utterances and the perlocutionary effects that emerged. The results of the study indicate that netizens' comments were dominated by expressive speech acts containing expressions of anger, disappointment, and criticism directed at the DPR. In addition, representative, directive, commissive, and declarative speech acts were identified, reflecting netizens' efforts to shape public opinion and influence readers' attitudes. This study confirms that social media serves as an important space for the public to express their aspirations and shape public responses through the use of language.

ABSTRAK

Perkembangan media sosial sebagai ruang komunikasi publik menyebabkan interaksi masyarakat tidak hanya terjadi secara langsung. Kolom komentar pada media sosial menjadi salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam menyampaikan tanggapan terhadap isu sosial dan politik yang berkembang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya respons warganet terhadap isu demonstrasi tunjangan DPR yang menunjukkan adanya penggunaan bahasa dengan maksud dan dampak tertentu bagi pembaca. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk tindak tutur perlokusi yang terdapat dalam komentar warganet serta menjelaskan efek yang ditimbulkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data penelitian berupa tuturan pada komentar warganet di unggahan Instagram Kompas.com terkait aksi demonstrasi tunjangan DPR periode Agustus-September 2025. Teknik pengumpulan

data dilakukan melalui metode simak dengan teknik lanjutan berupa catat dan pilah. Analisis data dilakukan menggunakan teori tindak tutur menurut Searle dengan mengidentifikasi bentuk tuturan dan efek perlokusi yang muncul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tuturan warganet didominasi oleh tindak tutur ekspresif yang berisi ungkapan kemarahan, kekecewaan, dan kritik terhadap DPR. Selain itu, ditemukan pula bentuk representatif, direktif, komisif, dan deklaratif yang menunjukkan upaya warganet dalam membangun opini serta memengaruhi sikap pembaca. Penelitian ini menegaskan bahwa media sosial menjadi ruang penting bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan membentuk respons publik melalui penggunaan bahasa.

Kata Kunci: *Tindak tutur perlokusi; Warganet; Instagram; Demonstrasi.*

This is an open-access article under the [CC-BY-SA](#) license.



Pendahuluan

Sejak 25 Agustus hingga awal September 2025 di berbagai wilayah Indonesia khususnya perkotaan besar mengalami lonjakan aksi demonstrasi yang tinggi. Demonstrasi tersebut bermula dari penolakan masyarakat terhadap kebijakan tunjangan baru bagi anggota DPR RI, khususnya tunjangan perumahan. Selain itu, kenaikan pajak bumi dan bangunan serta kekecewaan terhadap pemerintah dalam menangani persoalan ekonomi dan biaya hidup juga menjadi faktor pendorong. Ketegangan semakin meningkat setelah pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, meninggal akibat tertabrak kendaraan lapis baja kepolisian yang menerobos massa saat kericuhan di Jakarta Pusat. Peristiwa tersebut kemudian memicu gelombang respons dari masyarakat, terutama komunitas pengemudi ojek online dan mahasiswa.

Aksi demonstrasi juga dipengaruhi oleh pernyataan sejumlah anggota parlemen yang dianggap tidak menunjukkan empati terhadap keresahan masyarakat. Pada 22 Agustus 2025, anggota DPR dari Partai NasDem, Nafa Urbach, mendukung kenaikan tunjangan dengan alasan adanya kendala perjalanan menuju tempat kerja. Di hari yang sama, Wakil Ketua Komisi III DPR dari partai yang sama, Ahmad Sahroni, menyampaikan kepada masyarakat; "Silakan kritik mau ngapain aja boleh, tapi jangan mencaci maki berlebihan. Itu merusak mental, mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia", sebelum akhirnya memberikan klarifikasi dan membela rekan sesama anggota parlemen.

Sementara itu, anggota DPR dari Partai Amanat Nasional (PAN), Eko Patrio, pada 20 Agustus 2025 mengunggah video parodi sound horeg yang dianggap tidak empatik dan dipersepsikan sebagai ejekan terhadap keresahan publik. Sebelumnya, masyarakat juga dihebohkan oleh video anggota DPR yang berjoget saat Sidang Tahunan di Gedung DPR/MPR pada 15 Agustus 2025. Unggahan tersebut kemudian dinilai sebagai bentuk respon yang menantang kritik publik terkait isu tunjangan DPR. Meskipun ketiganya telah menyampaikan permintaan maaf, respon masyarakat tetap didominasi kekecewaan dan kritik keras terhadap anggota DPR. Fenomena demonstrasi tersebut mendorong warganet mengekspresikan kritik dan kekecewaan terhadap kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada masyarakat. DPR yang seharusnya mewakili kepentingan rakyat justru dinilai menghasilkan kebijakan yang bertentangan dengan kesejahteraan publik.

Demonstrasi tidak semata-mata diartikan sebagai tindakan menyuarakan keinginan, melainkan juga berperan sebagai area untuk menunjukkan aktualisasi diri lewat protes yang kemudian diposting di media sosial (Syahrul Jiwandono, 2020). Dalam fenomena aksi demonstrasi tuntutan DPR, media sosial mempercepat penyebaran informasi yang sering kali memicu diskusi intensif dan menjadi opini publik di antara warganet (Devi et al., 2024). Di Indonesia saat ini, pemanfaatan media sosial telah menjadi salah satu faktor utama dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyebarkan berbagai informasi, terutama

melalui platform media sosial populer seperti Instagram, Facebook, dan Twitter (Zahra et al., 2020).

Melalui Instagram, pengguna dapat membagikan foto dan video serta berinteraksi dengan pengguna lain melalui fitur komentar dan pesan langsung (Asari, 2023). Dalam konteks isu publik, terdapat tiga bentuk ekspresi masyarakat di media sosial, yaitu partisipasi dalam mendukung atau menolak kebijakan, keterlibatan dalam proses politik atau pengambilan keputusan, serta upaya meningkatkan modal dan partisipasi sosial (Suriati, 2021). Dalam konteks demonstrasi Tunjangan DPR, ekspresi atau reaksi publik yang muncul berupa komentar-komentar dari unggahan tersebut, mulai dari kritik tajam, sindiran halus, ekspresi kekecewaan, hingga dukungan terhadap gerakan demonstrasi. Komentar-komentar ini tidak hanya merupakan cara untuk berpartisipasi secara digital, tetapi juga menunjukkan berbagai gaya komunikasi yang mempengaruhi pembaca atau sasaran ujaran, di mana dapat dikaitkan dengan tindak tutur perlokusi dalam kajian pragmatik (Anjarini & Ningsih, 2024).

Dalam kajian pragmatik, terdapat beberapa bidang yang dibahas, di antaranya deiksis, praanggapan, implikatur percakapan, dan tindak tutur. Tindak tutur tidak dapat dipisahkan dari konteks yang melatarbelakangi munculnya suatu ujaran. Konteks berkaitan erat dengan budaya serta lingkungan penutur (Rahardi, 2022). Menurut Austin (1962), tindak tutur terbagi menjadi tiga jenis, yaitu lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Tindak lokusi berkaitan dengan aktivitas menyampaikan ujaran, seperti memberikan informasi, berbicara, atau bertanya. Tindak ilokusi merupakan tindakan yang dilakukan melalui tuturan, seperti memberi izin, memerintah, berjanji, atau menawarkan. Sementara itu, tindak perlokusi mengacu pada efek atau pengaruh yang muncul akibat suatu tuturan terhadap pendengar, baik dalam bentuk perubahan sikap maupun keadaan mental (Alexander Bala, 2022).

Searle (1976) menjelaskan bahwa tindak tutur perlokusi dapat dikelompokkan menjadi lima jenis utama, yaitu representatif, direktif, komisif, ekspresif, dan deklaratif (Arma & Katubi, 2022). Uraian singkatnya sebagai berikut.

1. Tindak tutur representatif, berkaitan dengan nilai benar atau tidak benar suatu pernyataan. Dalam perlokusi ini, penutur terikat pada kebenaran proposisi yang disampaikan, seperti dalam tindakan menyatakan, mengajukan usulan, membual, menyampaikan pendapat, melaporkan, serta mengeluh.
2. Tindak tutur direktif, merefleksikan upaya penutur untuk mendorong petutur agar melakukan suatu tindakan demi tercapainya tujuan tertentu. Contoh tindak tutur direktif antara lain memerintah, memohon, menuntut, dan bentuk sejenisnya.
3. Tindak tutur komisif, berfungsi melakukan perubahan terhadap keseluruhan dengan cara menciptakan suatu kewajiban. Tindak tutur ini memiliki arah kesesuaian dari tindakan ke kata. Dengan demikian, dalam perlokusi ini penutur terikat, baik secara langsung maupun tidak langsung pada tindakan di masa mendatang, seperti berjanji, menawarkan, berkaul, dan sejenisnya.
4. Tindak tutur ekspresif, digunakan untuk menunjukkan keadaan psikologis atau perasaan penutur tanpa adanya hubungan kesesuaian antara tuturan dan kenyataan. Contohnya berupa ucapan terima kasih, permintaan maaf, pujian, dan ucapan selamat.
5. Tindak tutur deklaratif, merupakan bentuk ujaran yang secara langsung mengubah keadaan atau status dalam dunia nyata. Tindak ini memiliki dua arah kesesuaian, yaitu dari kata ke tindakan dan dari tindakan ke kata. Tindak deklaratif termasuk kategori tindak tutur yang bersifat sangat khusus karena hanya dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan institusional dalam suatu lembaga.

Penelitian ini didukung oleh kajian terdahulu sebagai rujukan. Pertama, penelitian Arinta dan Asep (2020) berjudul *Tindak Tutur Perlokusi dalam Konpers Presiden Soal Covid-19 pada Saluran YouTube CNN Indonesia* mengkaji tuturan perlokusi dalam konferensi pers Presiden RI serta efek yang ditimbulkannya. Hasilnya ditemukan 13 bentuk tindak tutur perlokusi, namun

penelitian tersebut masih terbatas pada tuturan penutur tunggal dalam konteks komunikasi resmi tanpa melibatkan respons masyarakat sebagai mitra tutur aktif. Kedua, penelitian Ida Ayu Made Wedasuwari et al. (2022) berjudul *Analisis Tindak Tutur Perlokusi Dalam Podcast Notif#1* membahas bentuk tindak tutur perlokusi dalam podcast Notif#1 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Mahasaraswati Denpasar dengan hasil penelitian menunjukkan adanya berbagai bentuk perlokusi sebanyak 14 tuturan. Namun, kajian ini hanya berfokus pada tuturan penutur utama dalam podcast. Ketiga, penelitian Khusnul Khotimah (2018) berjudul *Analisis Tindak Tutur dalam Video Orasi Aksi Cabut UU Cipta Kerja Omnibus Law di Samarinda* mengkaji jenis tindak tutur dalam orasi demonstrasi serta makna pragmatik yang terkandung di dalamnya. Namun, kajian ini hanya berfokus pada produksi tuturan dalam aksi demonstrasi dan belum menelaah respon masyarakat di media sosial.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana bentuk tindak tutur perlokusi warganet terhadap aksi demonstrasi tunjangan DPR di Instagram Kompas.com bulan Agustus-September 2025. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk tindak tutur perlokusi warganet terhadap aksi tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman dalam kajian bahasa Indonesia, khususnya bidang pragmatik mengenai tindak tutur perlokusi, serta menjadi referensi dalam penelitian pendidikan dan kebahasaan.

Metode

Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk-bentuk tindak tutur perlokusi yang digunakan warganet dalam merespons dan mengomentari aksi demonstrasi Tunjangan DPR di Instagram Kompas.Com. Oleh sebab itu, metode pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk menyelidiki, menemukan, mengembangkan, dan menjelaskan kualitas atau karakteristik unik yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan secara kuantitatif atau angka (Sugiyono, 2019). Penelitian deskriptif menggambarkan kejadian-kejadian atau peristiwa yang ada dalam kehidupan objeknya. Data yang diperoleh dianalisis kemudian dideskripsikan secara runtut (Yuliani, 2018). Objek penelitian ini berupa komentar atau respons warganet di akun Instagram Kompas.com yang membahas atau menanggapi unggahan terkait aksi demonstrasi mengenai tunjangan DPR pada periode Agustus-September 2025.

Data dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk tuturan komentar warganet di akun Instagram Kompas.com yang diambil dari akun yang berbeda-beda. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu akun resmi Instagram Kompas.com, khususnya pada unggahan (posting) yang memuat informasi mengenai aksi demonstrasi terkait tunjangan DPR dalam rentang waktu Agustus-September 2025. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa teknik simak dengan teknik lanjutan berupa teknik catat. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teknik pilah dengan metode padan. Sudaryanto (2015) menjelaskan bahwa teknik catat digunakan untuk merekam atau menuliskan data yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Hasil penelitian ini mencakup hal yang sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang dibahas, yaitu bagaimana bentuk tindak tutur perlokusi warganet terhadap aksi demonstrasi tunjangan DPR di Instagram Kompas.com bulan Agustus-September 2025. Berikut merupakan tabel daftar tuturan yang mengandung perlokusi dalam kolom komentar Instagram Kompas.com berupa 15 tuturan.

Table 1.
Distribusi Tuturan Warganet yang Dibedakan Berdasarkan Jenis Perlokusinya

<i>Tuturan</i>	<i>Jenis Perlokusi</i>	<i>Konteks Tuturan</i>
"Nggak ada gunanya DPR bagi rakyat sama sekali nggak mewakili rakyat tp mewakili partainya saja"	Representatif	Tuturan (komentar) warganet pemilik akun <i>@sektiyojojoko</i> dalam sebuah video yang memuat seorang anggota dewan membagikan detail gaji dan tunjangan saat diwawancarai oleh media.
"Stop bayar pajak, harga keringat sendiri, buat sendiri bukan buat pejabat"	Direktif	Tuturan (komentar) yang ditulis oleh pemilik akun <i>@micoo__</i> dalam sebuah unggahan foto yang menunjukkan rincian data mengenai besaran gaji dan tunjangan DPR.
"Lengserin Puan Maharani, dia nggak pantas megang jabatan itu karena dia yang mengelola masalah fasilitas DPR. Selama dia belum mundur, DPR tidak akan berubah."	Direktif	Tuturan (komentar) dari pemilik akun <i>@prelovedby_ranran</i> dalam sebuah video yang menunjukkan dua mahasiswa UI berpendapat mengenai ketidakpuasan terhadap perubahan tunjangan DPR.
"Ya Allah pintar2 dan kreatif2 bgt adik adik gw"	Ekspresif	Tuturan (komentar) dari pemilik akun <i>@esotericonscious888</i> dalam sebuah video ketika mahasiswa diwawancarai untuk menilai kinerja DPR tentang 17+8 tuntutan rakyat.
"ALAHHH NGILANGIN BARANG NGILANGIN BUKTI INIMAHHHHH"	Ekspresif	Tuturan (komentar) dari pemilik akun <i>@sam_anara</i> dalam sebuah unggahan berita bahwa sebanyak 592 akun medsos yang dinilai menyebarkan provokasi pada saat demonstrasi sudah diblokir polisi.
"Mereka terlalu enak dan lupa, sekaligus penghina rakyat, dan sengaja rakyat sebagai bosnya malah diinjak-injak."	Ekspresif	Tuturan (komentar) dari pemilik akun <i>@rockymantiaha</i> ketika mahasiswa menyampaikan aspirasinya " <i>kok bisa ekonomi lesu tapi tunjangan naik dan joget-joget?</i> " ketika berdiskusi dengan para anggota DPR.
"Lebih keren sih kalau semua masyarakat demo langsung ke dalam duduk bareng anggota DPR"	Direktif	Tuturan (komentar) warganet dari pemilik akun <i>@wahid08_</i> dalam unggahan berita yang menyatakan bahwa Menteri HAM, Piga, mengusulkan DPR untuk membuat lapangan demonstrasi di halaman parlemen.

“Pada pinter banget dah DPR, biar keliatan gaji kecil tunjangan digedein. Rakyat diperas pajak untuk mereka yang tidak mewakili rakyat”	Ekspresif	Tuturan (komentar) warganet dari pemilik akun @marthasandi dalam sebuah unggahan ketika Ketua BEM UI diwawancarai mengenai ketidakkepuasan terhadap perubahan tunjangan DPR.
“DPR lagi cari cara baru bagaimana untuk manipulasi lagi”	Representatif	Tuturan (komentar) warganet dari pemilik akun @rizalpopon19 ketika mahasiswa pendemo menilai kinerja DPR terkait 17+8 tuntutan rakyat.
“Udah berkali-kali DPR dikasih lembut tapi apa hasilnya? mereka ga peduli bang, gak ada salahnya dikasih keras biar mereka sadar”	Direktif	Tuturan (komentar) warganet dari pemilik akun @dwi9_ dalam unggahan berita yang menunjukkan seorang ojol (ojek online) menyampaikan orasi dan aspirasinya bahwa ia tidak setuju terkait ajakan untuk membakar gedung DPR, melainkan seharusnya membakar tikus di dalamnya yang dapat diartikan sebagai anggota DPR.
“Coba klo tidak didemo pasti nggak minta maaf.”	Deklaratif	Tuturan (komentar) dari pemilik akun @rudysulistanto dalam sebuah video yang menampilkan Ketua DPR, Puan Maharani yang menyatakan bahwa DPR berjanji akan melakukan evaluasi, berbenah, dan mendengar aspirasi rakyat.
“Jomplang banget gaji DPR dan UMR rakyat, kalo di negara maju mau pajak naik tapi hasilnya keliatan mah kagak apa-apa. di sini pajak naik hanya untuk memelihara hawa nafsu pejabat, miris.”	Representatif	Tuturan (komentar) dari pemilik akun @kaka_hkp dalam unggahan berita perbandingan gaji DPR vs UMR antara Indonesia dengan beberapa negara seperti Amerika, Jerman, Singapura, Malaysia, Filipina, dan Australia.
“Udah jangan pada comment, ga bakal sampe ke mereka,,, kita buktiin aja 2029 jangan ada yg pilih anggota DPR. Gitu aja.”	Komisif	Tuturan (komentar) warganet dari pemilik akun @ingvarfajarwillyarto dalam sebuah unggahan berita yang menampilkan seorang anggota DPR sedang diwawancara mengenai rincian gaji dan tunjangan.
“Astaghfirullah Al’aadziim.. bapak dapat tunjangan beras CUMA 12 juta. kenapa beda sekali beras yang bapak makan dengan beras yang dimakan ASN? beras apa itu pak? gaji PNS golongan 4 saja yang sudah puluhan tahun mengabdikan sampai	Representatif	Tuturan (komentar) warganet dari pemilik akun @griyacitraayu dalam sebuah unggahan berita yang menampilkan seorang anggota DPR sedang diwawancara mengenai rincian gaji dan tunjangan.

pensiunnya nggak sampai 4 juta sebulan pak... Astaghfirullah Al'aadziim.."

"Nasdem bagus juga Representatif integrasinya ya ternyata, tidak seperti PDI-P, masa hanya minta maaf dengan air mata. Dari sini kita sudah tahu, mana parpol yang masih memiliki nilai yang baik."

Tuturan (komentar) warganet dari pemilik akun @melkias.dmk dalam sebuah berita mengenai partai Nasdem yang meminta DPR untuk tidak memberikan lagi gaji dan tunjangan bagi Sahroni serta Nafa Urbach.

Pembahasan

Berdasarkan tabel 1 mengenai distribusi tuturan warganet dalam berita di akun Instagram Kompas.com yang membahas demonstrasi tunjangan DPR, terdapat beberapa komentar yang mengandung tindak tutur perlokusi. Komentar pada tabel 1 tersebut dibedakan berdasarkan jenis perlokusi serta konteks tuturan yang melatarbelakanginya, dengan ditemukan jenis perlokusi representatif sejumlah lima tuturan, perlokusi direktif sejumlah empat tuturan, perlokusi ekspresif sejumlah empat tuturan, perlokusi komisif sejumlah satu tuturan, serta perlokusi deklaratif sejumlah satu tuturan. Sehingga total data yang disajikan dalam penelitian ini berjumlah 15 tuturan.

a. Tindak Tutur Perlokusi Representatif

Tindak tutur representatif, berkaitan dengan nilai benar atau tidak benar suatu pernyataan. Jenis tindak tutur ini menuntut adanya arah kesesuaian dari ujaran menuju realitas. Dalam perlokusi ini, penutur terikat pada kebenaran proposisi yang disampaikan, seperti dalam tindakan menyatakan, mengajukan usulan, membual, menyampaikan pendapat, melaporkan, serta mengeluh. Berikut analisis tindak tutur representatif berdasarkan data yang ditemukan pada tabel 1.

Data 1: *"Nggak ada gunanya DPR bagi rakyat sama sekali nggak mewakili rakyat tp mewakili partainya saja"*

Analisis: Pada konteks tuturan warganet @sektiyonojoko dalam sebuah video yang memuat seorang anggota dewan membagikan detail gaji dan tunjangan saat diwawancarai oleh media, tuturan tersebut menghasilkan efek perlokusi berupa memicu ketidakpercayaan massal dan sinisme terhadap DPR di ranah digital, sekaligus memicu tekanan publik serta penurunan citra bagi institusi legislatif tersebut. Sementara itu, letak kerepresentatifan tuturan ini sebagai tindak tutur yang mengklaim suatu kebenaran atas realitas berada pada klausa *"Nggak ada gunanya DPR bagi rakyat"* yang berfungsi memberikan penilaian subjektif atas kegunaan institusi, serta klausa *"sama sekali nggak mewakili rakyat tp mewakili partainya saja"* yang berfungsi menegaskan kesimpulan penutur bahwa orientasi kerja anggota dewan telah bergeser dari kepentingan publik ke kepentingan golongan (partai).

Data 2: *"DPR lagi cari cara baru bagaimana untuk manipulasi lagi"*

Analisis: Pada konteks tuturan warganet @rizalpojon19 ketika mahasiswa pendemo menilai kinerja DPR terkait 17+8 tuntutan rakyat, tuturan tersebut menghasilkan efek perlokusi berupa membuat masyarakat bersikap skeptis dan memicu gerakan penolakan yang lebih besar terhadap DPR. Komentar ini

memengaruhi pembaca untuk berpikiran negatif dan tidak lagi memercayai tindakan yang akan diambil oleh DPR. Secara khusus, frasa “*cari cara baru*” menjadi letak tuduhan langsung bahwa terdapat rencana negatif yang sedang dipersiapkan oleh DPR, sedangkan frasa “*untuk manipulasi lagi*” merupakan penegasan dari penutur bahwa lembaga tersebut dinilai sudah terbiasa membohongi rakyat.

Data 3: *“Jomplang banget gaji DPR dan UMR rakyat, kalo di negara maju mau pajak naik tapi hasilnya keliatan mah kagak apa-apa. di sini pajak naik hanya untuk memelihara hawa nafsu pejabat, miris.”*

Analisis: Tuturan (komentar) dari pemilik akun @kaka_hkp dalam unggahan berita perbandingan gaji DPR vs UMR antara Indonesia dengan beberapa negara seperti Amerika, Jerman, Singapura, Malaysia, Filipina, dan Australia. Tuturan tersebut menghasilkan efek perlokusi berupa memicu rasa ketidakadilan sosial, memperkuat kecemburuan ekonomi, serta menumbuhkan sikap skeptis masyarakat terhadap kebijakan kenaikan pajak. Sementara itu, letak kerepresentatifan dari tuturan ini berada pada klausa “*Jomplang banget gaji DPR dan UMR rakyat*” yang berfungsi menyatakan penilaian atas ketimpangan pendapatan yang nyata, serta klausa “*di sini pajak naik hanya untuk memelihara hawa nafsu pejabat*” yang menjadi penegasan simpulan penutur mengenai adanya penyalahgunaan uang rakyat oleh para pejabat.

Data 4: *“Astaghfirullah Al’aadziim.. bapak dapat tunjangan beras CUMA 12 juta. kenapa beda sekali beras yang bapak makan dengan beras yang dimakan ASN? beras apa itu pak? gaji PNS golongan 4 saja yang sudah puluhan tahun mengabdikan sampai pensiunnya nggak sampai 4 juta sebulan pak... Astaghfirullah Al’aadziim..”*

Analisis: Tuturan (komentar) warganet dari pemilik akun @griyacitraayu dalam sebuah unggahan berita yang menampilkan seorang anggota DPR sedang diwawancara mengenai rincian gaji dan tunjangan. Tuturan tersebut menghasilkan efek perlokusi berupa memicu keterkejutan moral di masyarakat, memperkuat rasa ketidakadilan sosial, serta menggerakkan simpati publik terhadap nasib ASN yang pendapatannya timpang jauh dengan pejabat. Sementara itu, letak kerepresentatifan berada pada klausa “*bapak dapat tunjangan beras CUMA 12 juta*” yang berfungsi menyatakan fakta tingginya nominal tunjangan pejabat, serta klausa “*gaji PNS golongan 4 saja yang sudah puluhan tahun mengabdikan sampai pensiunnya nggak sampai 4 juta sebulan pak*” yang berfungsi menegaskan perbandingan kesenjangan ekonomi dalam realitas objektif.

Data 5: *“Nasdem bagus juga integrasinya ya ternyata, tidak seperti PDI-P, masa hanya minta maaf dengan air mata. Dari sini kita sudah tahu, mana parpol yang masih memiliki nilai yang baik.”*

Analisis: Tuturan (komentar) warganet dari pemilik akun @melkias.dmk dalam sebuah berita mengenai partai Nasdem yang meminta DPR untuk tidak memberikan lagi gaji dan tunjangan bagi Sahroni serta Nafa Urbach. Tuturan tersebut menghasilkan efek perlokusi berupa menggiring opini publik untuk mengapresiasi langkah politik partai NasDem, sekaligus memicu sentimen negatif atau sinisme terhadap PDI-P melalui perbandingan tersebut. Sementara itu, letak kerepresentatifan berada pada klausa “*Nasdem bagus juga integrasinya ya ternyata, tidak seperti PDI-P*” yang berfungsi memberikan penilaian komparatif atas kualitas integritas partai, serta klausa “*Dari sini kita sudah tahu,*

mana parpol yang masih memiliki nilai yang baik" yang berfungsi menegaskan simpulan penutur mengenai standar moral partai politik.

b. Tindak Tutur Perlokusi Direktif

Tindak tutur direktif merefleksikan upaya penutur untuk mendorong petutur agar melakukan suatu tindakan demi tercapainya tujuan tertentu. Berbeda dari tindak representatif, jenis ini memiliki arah kesesuaian dari realitas ke ujaran, artinya dunia diupayakan agar selaras dengan kata-kata yang diucapkan. Dalam tindak direktif, muncul kewajiban yang harus dipenuhi oleh petutur. Berikut analisis tindak tutur representatif berdasarkan data yang ditemukan pada tabel 1.

Data 1: *"Stop bayar pajak, hargai keringat sendiri, buat sendiri bukan buat pejabat"*

Analisis: Tuturan (komentar) yang ditulis oleh pemilik akun @micoo__ dalam sebuah unggahan foto yang menunjukkan rincian data mengenai besaran gaji dan tunjangan DPR. Tuturan tersebut menghasilkan efek perlokusi berupa provokasi atau menggerakkan pembaca untuk melakukan aksi nyata berupa pembangkangan sipil dalam bentuk boikot pajak (*tax resistance*). Sementara itu, letak kedirektifan tuturan ini yaitu bagian yang mengandung fungsi perintah, ajakan, atau desakan agar mitra tutur melakukan suatu tindakan, berada pada klausa imperatif *"Stop bayar pajak"* yang secara lugas memerintahkan penghentian pembayaran pajak kepada negara, serta klausa *"hargai keringat sendiri"* yang berfungsi sebagai anjuran persuasif untuk menghentikan kontribusi finansial demi melindungi hasil kerja keras masyarakat dari pemanfaatan oleh para pejabat.

Data 2: *"Lengserin Puan Maharani, dia nggak pantas megang jabatan itu karena dia yang mengelola masalah fasilitas DPR. Selama dia belum mundur, DPR tidak akan berubah."*

Analisis: Tuturan (komentar) dari pemilik akun @prelovedby_ranran dalam sebuah video yang menunjukkan dua mahasiswa UI berpendapat mengenai ketidakpuasan terhadap perubahan tunjangan DPR. Tuturan tersebut menghasilkan efek perlokusi berupa memprovokasi opini publik untuk mendesak pencopotan jabatan figur politik, serta memobilisasi desakan kolektif masyarakat guna menuntut reformasi kepemimpinan di DPR. Sementara itu, memerintahkan atau mendesak suatu tindakan, berada pada klausa imperatif *"Lengserin Puan Maharani"* yang secara eksplisit menuntut penurunan tokoh tersebut dari posisinya, serta diperkuat oleh klausa *"Selama dia belum mundur"* yang mengandung tuntutan agar yang bersangkutan segera meletakkan jabatannya demi terjadinya perubahan pada institusi legislatif.

Data 3: *"Lebih keren sih kalau semua masyarakat demo langsung ke dalam duduk bareng anggota DPR"*

Analisis: Tuturan (komentar) warganet dari pemilik akun @wahid08_ dalam unggahan berita yang menyatakan bahwa Menteri HAM, Pigai, mengusulkan DPR untuk membuat lapangan demonstrasi di halaman parlemen. Tuturan tersebut menghasilkan efek perlokusi berupa mendorong keinginan publik untuk melakukan aksi protes yang secara langsung dengan cara menduduki gedung parlemen, serta membangun solidaritas kolektif untuk menolak pembatasan ruang demonstrasi yang diusulkan oleh pemerintah. Sementara itu, letak

kedirektifan tuturan ini yaitu bagian yang mengekspresikan anjuran atau saran tindakan secara tidak langsung, berada pada klausa *"kalau semua masyarakat demo langsung ke dalam duduk bareng anggota DPR"*, khususnya pada frasa *"demo langsung ke dalam duduk bareng"* yang secara persuasif mengarahkan masyarakat untuk memanfaatkan ruang diskusi tertutup daripada lapangan demo di luar halaman.

Data 4: *"Udah berkali-kali DPR dikasih lembut tapi apa hasilnya? mereka ga peduli bang, gak ada salahnya dikasih keras biar mereka sadar"*

Analisis: Tuturan (komentar) warganet dari pemilik akun @dwi9_ dalam unggahan berita yang menunjukkan seorang ojol (ojek online) menyampaikan orasi dan aspirasinya bahwa ia tidak setuju terkait ajakan untuk membakar gedung DPR, melainkan seharusnya membakar tikus di dalamnya yang dapat diartikan sebagai anggota DPR. Tuturan tersebut menghasilkan efek perlokusi berupa memprovokasi atau menggerakkan massa untuk mengubah strategi perjuangan dari cara-cara damai menjadi tindakan yang lebih agresif, keras, atau konfrontatif terhadap anggota dewan. Sementara itu, letak kedirektifan tuturan ini yaitu bagian yang mengekspresikan anjuran atau rekomendasi tindakan secara tidak langsung, berada pada klausa *"gak ada salahnya dikasih keras biar mereka sadar"*, khususnya pada frasa *"dikasih keras"* yang berfungsi secara persuasif mendesak khalayak agar menggunakan metode penekanan yang ekstrem sebagai satu-satunya cara yang dinilai efektif untuk memaksa para legislator memenuhi tuntutan rakyat.

c. Tindak Tutur Perlokusi Ekspresif

Tindak tutur ekspresif, berfungsi menyatakan kondisi atau sikap psikologis penutur dan tidak menunjukkan adanya arah kesesuaian antara ujaran dan realitas. Berikut analisis tindak tutur representatif berdasarkan data yang ditemukan pada tabel 1.

Data 1 *"Ya Allah pinter2 dan kreatif2 bgt adik adik gw"*

Analisis: Tuturan (komentar) dari pemilik akun @esotericonscious888 dalam sebuah video ketika mahasiswa diwawancarai untuk menilai kinerja DPR tentang 17+8 tuntutan rakyat. Tuturan tersebut menghasilkan efek perlokusi berupa menumbuhkan rasa bangga, solidaritas, dan dukungan kolektif di antara warganet terhadap gerakan mahasiswa. Pujian ini berhasil mengarahkan opini publik untuk memandang positif aksi intelektual mahasiswa dan memvalidasi kebenaran dari aspirasi yang mereka suarkan terhadap DPR. Sementara itu, letak keekspresifan tuturan ini yaitu bagian yang mengekspresikan emosi psikologis penutur berupa rasa kagum dan apresiasi, berada pada kata *"Ya Allah"* serta frasa adjektival *"pinter2 dan kreatif2 bgt"*.

Data 2 *"ALAHHH NGILANGIN BARANG BUKTI INIMAHHHHH"*

Analisis: Tuturan (komentar) dari pemilik akun @sam_anara dalam sebuah unggahan berita bahwa sebanyak 592 akun medsos yang dinilai menyebarkan provokasi pada saat demonstrasi sudah diblokir polisi. Tuturan tersebut menghasilkan efek perlokusi berupa memperkuat sentimen ketidakpercayaan publik (*public distrust*) terhadap institusi kepolisian, memicu sinisme massal, serta menggiring opini pembaca untuk mencurigai tindakan pemblokiran akun tersebut sebagai upaya penutupan kebenaran berkedok keamanan. Sementara itu, letak keekspresifan tuturan ini yaitu bagian yang menyalurkan emosi kemarahan, kejengkelan, dan ketidakpercayaan penutur, berada pada kata seru *"ALAHHH"*

serta keseluruhan klausa yang ditulis dengan huruf kapital dan perpanjangan huruf vokal *"NGILANGIN BARANG BUKTI INIMAAAAHHHH"*. Kombinasi elemen kebahasaan tersebut berfungsi secara langsung untuk mengekspresikan rasa geram dan sinisme mendalam penutur dalam mengklaim tindakan pemblokiran sebagai bentuk manipulasi oleh aparat.

Data 3 *"Mereka terlalu enak dan lupa, sekaligus penghina rakyat, dan sengaja rakyat sebagai bosnya malah diinjak-injak."*

Analisis: Tuturan (komentar) dari pemilik akun *@rockymantiaha* ketika mahasiswa menyampaikan aspirasinya *"kok bisa ekonomi lesu tapi tunjangan naik dan joget-joget?"* ketika berdiskusi dengan para anggota DPR. Tuturan tersebut menghasilkan efek perlokusi berupa menyulut kemarahan masyarakat, memperkuat rasa kekecewaan politik, serta memvalidasi rasa frustrasi atas ketidakpekaan sosial para anggota dewan yang menaikkan tunjangan di tengah kelesuan ekonomi. Sementara itu, letak keekspresifan tuturan ini yaitu bagian yang menyalurkan emosi kemarahan, kecaman, dan rasa terhina dari penutur, berada pada frasa *"terlalu enak dan lupa"*, frasa *"penghina rakyat"*, serta klausa *"sengaja rakyat sebagai bosnya malah diinjak-injak"*. Penggunaan diksi yang bermuatan emosi tinggi serta metafora *"diinjak-injak"* tersebut berfungsi secara langsung untuk mengekspresikan rasa geram dan protes moral penutur atas perusakan logika demokrasi, di mana wakil rakyat dinilai justru menindas masyarakat yang seharusnya mereka layani.

Data 4 *"Pada pintar banget dah DPR, biar kelihatan gaji kecil tunjangan digedein. Rakyat diperas pajak untuk mereka yang tidak mewakili rakyat"*

Analisis: Tuturan (komentar) warganet dari pemilik akun *@marthasandi* dalam sebuah unggahan ketika Ketua BEM UI diwawancarai mengenai ketidakpuasan terhadap perubahan tunjangan DPR. Tuturan tersebut menghasilkan efek perlokusi berupa memicu sinisme terhadap transparansi keuangan DPR, menggerakkan pembaca untuk bersikap skeptis dan ikut mengecam manipulasi tunjangan pejabat, serta menyulut rasa kecewa masyarakat terkait ketidakadilan beban pajak. Sementara itu, letak keekspresifan tuturan ini yaitu bagian yang menyalurkan emosi kejengkelan, sindiran, dan rasa ketidakadilan penutur, berada pada frasa sarkasme *"Pada pintar banget dah"* yang berfungsi mengekspresikan ironi tajam atas kelicikan pengaturan anggaran, serta klausa *"Rakyat diperas pajak"* yang secara emosional mengekspresikan rasa tertindas akibat eksploitasi finansial demi kepentingan elit politik yang dinilai tidak lagi mewakili suara rakyat.

d. Tindak Tutur Perlokusi Komisif

Tindak tutur komisif, berfungsi melakukan perubahan terhadap keseluruhan dengan cara menciptakan suatu kewajiban di mana penutur mengikatkan dirinya sendiri untuk melaksanakan tindakan tertentu. Tindak tutur ini memiliki arah kesesuaian dari tindakan ke kata. Perbedaannya dengan tindak tutur direktif terletak pada letak kewajiban, yakni pada tindak komisif kewajiban berada pada penutur, bukan pada petutur. Berikut analisis

tindak tutur representatif berdasarkan data yang ditemukan pada tabel 1.

Data 1 *"Udah jangan pada comment, ga bakal sampe ke mereka,,, kita buktiin aja 2029 jangan ada yg pilih anggota DPR. Gitu aja."*

Analisis: Tuturan (komentar) warganet dari pemilik akun @ingvarfajarwillyarto dalam sebuah unggahan berita yang menampilkan seorang anggota DPR sedang diwawancara mengenai rincian gaji dan tunjangan. Tuturan tersebut menghasilkan efek perlokusi berupa mengikat komitmen kolektif pembaca untuk melakukan aksi politik nyata di masa depan serta meredam luapan kemarahan instan yang dinilai sia-sia di kolom komentar. Tuturan ini berhasil mengalihkan frustrasi sosial yang pasif menjadi sebuah tekad bersama untuk memberikan sanksi politik pada momentum pemilu mendatang. Klausa *"kita buktiin aja 2029 jangan ada yg pilih anggota DPR"*, dikategorikan sebagai tindak tutur komisif karena mengandung elemen keterikatan (*commitment*) dari penutur yang juga melibatkan pembaca (diwakili oleh kata inklusif "kita") untuk melakukan suatu rencana tindakan konkret pada masa depan (tahun 2029).

e. Tindak Tutur Perlokusi Deklaratif

Tindak tutur deklaratif, merupakan bentuk ujaran yang secara langsung mengubah keadaan atau status dalam dunia nyata, misalnya perubahan dari dua individu biasa menjadi pasangan suami istri. Tindak ini memiliki dua arah kesesuaian, yaitu dari kata ke tindakan dan dari tindakan ke kata. Keberhasilan pelaksanaan perlokusi deklaratif akan menghasilkan keselarasan antara isi proposisi dan realitas yang terjadi, seperti dalam tindakan membaptis, memberhentikan, memberi nama, menjatuhkan hukuman, mengangkat pegawai, dan lain-lain. Tindak deklaratif termasuk kategori tindak tutur yang bersifat sangat khusus karena hanya dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan institusional dalam suatu lembaga. Berikut analisis tindak tutur representatif berdasarkan data yang ditemukan pada tabel 1.

Data 1 *"Coba klo tidak didemo pasti nggak minta maaf."*

Analisis: Tuturan (komentar) dari pemilik akun @rudysulistanto dalam sebuah video yang menampilkan Ketua DPR, Puan Maharani yang menyatakan bahwa DPR berjanji akan melakukan evaluasi, berbenah, dan mendengar aspirasi rakyat. Tuturan tersebut menghasilkan efek perlokusi berupa membangun rasa skeptis di kalangan publik agar menganggap respons pejabat tersebut murni karena tekanan, bukan kesadaran moral. Bagian klausa *"Coba klo tidak didemo pasti nggak minta maaf"* dikategorikan sebagai deklaratif karena penutur menggunakannya untuk menetapkan sebuah keputusan sosial yang mutlak (ditandai dengan penegasan kata "pasti"). Dalam perspektif pragmatik, tuturan ini bertindak sebagai bentuk deklarasi sepihak yang mengubah status tindakan minta maaf pejabat, dari yang semula diklaim oleh institusi sebagai bentuk itikad baik, dideklarasikan ulang oleh penutur sebagai sebuah keterpaksaan akibat situasi demonstrasi.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa komentar warganet pada unggahan Instagram Kompas.com mengenai aksi demonstrasi tunjangan DPR mengandung berbagai bentuk tindak tutur perlokusi yang menunjukkan adanya pengaruh tuturan terhadap pembaca. Data penelitian didominasi oleh tindak tutur perlokusi ekspresif, yaitu tuturan yang digunakan warganet untuk mengungkapkan perasaan seperti kemarahan, kekecewaan, sindiran, dan ketidakpercayaan terhadap kebijakan maupun kinerja DPR. Selain

ekspresif, ditemukan pula tindak tutur direktif, representatif, komisif, dan deklaratif yang menunjukkan bahwa komentar warganet tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian pendapat, tetapi juga sebagai sarana untuk memengaruhi cara berpikir, membangun opini, serta mendorong respons tertentu dari pengguna lain. Efek perlokusi yang paling banyak muncul berupa pembentukan sikap kritis, peningkatan rasa kecewa, munculnya kecurigaan, serta dorongan untuk memberikan respons terhadap isu sosial-politik yang berkembang.

Penelitian ini menunjukkan bahwa kolom komentar Instagram menjadi ruang komunikasi digital yang memungkinkan masyarakat menyampaikan sikap dan pandangan terhadap fenomena politik secara terbuka. Kontribusi penelitian ini memberikan gambaran mengenai penggunaan bahasa warganet dalam menyampaikan kritik melalui perspektif pragmatik, khususnya kajian tindak tutur perlokusi. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada komentar dalam unggahan Instagram Kompas.com mengenai isu demonstrasi tunjangan DPR pada periode tertentu, sehingga belum mencakup bentuk respons warganet pada platform media sosial lainnya. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas sumber data, menggunakan objek kajian yang lebih beragam, serta mengkaji hubungan antara tindak tutur dengan faktor sosial yang melatarbelakangi munculnya suatu tuturan.

Daftar Pustaka

- Alexander Bala. (2022). Kajian Tentang Hakikat, Tindak Tutur, Konteks, dan Muka Dalam Pragmatik. *Jurnal Retorika*, Vol. 3(No.1).
- Anjarini, S., & Ningsih, R. (2024). Tindak Tutur Direktif Pada Kolom Komentar Tiktok Ganjar Pranowo Tentang Pungli. *Jurnal Genre (Bahasa, Sastra, Dan Pembelajarannya)*, 6(1), 37–48. <https://doi.org/10.26555/jg.v6i1.9954>
- Arma, D. K., & Katubi. (2022). *Tindak Tutur Dan Kesantunan* (M. Aditiawarman, Ed.). Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia (PRCI).
- Asari, A. (2023). *Peran Media Sosial Dalam Pendidikan* (M. A. Yaqin, Ed.). CV. ISTANA AGENCY.
- Devi, K. T. K., Wirantari, I. D. A. P., & Wijaya, K. A. S. (2024). Efektivitas Penggunaan Media Sosial Dalam Penyebaran Informasi Publik Guna Mencegah Penyebaran Berita Hoax Oleh Diskominfo Kota Denpasar. *Socio-Political Communication and Policy Review*, 1(5). <https://doi.org/10.61292/shkr.171>
- Fatihah, A. C. (2020, April). Analisis Tindak Tutur Perlokusi Dalam Konpers Presiden Soal Covid-19 Pada Saluran Youtube CNN Indonesia. *Metamorfosis Jurnal Bahasa, Sastra Indonesia dan Pengajarannya*, Vol 13 No 1.
- Matthew B. Miles, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd Edition ed.). California: SAGE Publications.
- Nadzifah, Z. N. (2020, Agustus). Tindak Tutur Perlokusi Pada Dialog Film “Keluarga Cemara” Karya Yandy Laurens. *Jurnal Bahasa, Sastra, Pembelajarannya*, Vol 3 (2).
- Rahardi, R. K. (2022). *Memerikan Fungsi Konteks Situasi Dalam Perspektif Pragmatik Siber*. (2), 197–211.
- Stepanus Angga, d. (2023, September). Etika Komunikasi Netizen Indonesia di Media Sosial sebagai Ruang Demokrasi dalam Telaah Ruang Publik Jürgen Habermas. *Jurnal Filsafat Indonesia*, Vol 6 No 3, 384-393.
- Sudaryanto. (2015). *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa: Pengantar Penelitian Wahana Kebudayaan secara Linguistik*. Sanata Dharma University Press.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Cetakan ke-26). Alfabeta.

- Suriati. (2021). Dakwah dan Hedonisme. *RETORIKA: Jurnal Kajian Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 3(1), 1-27. <https://doi.org/10.47435/retorika.v3i1.577>
- Syahrul Jiwandono, I. (n.d.). *Dinamika Sosial Sikap Narcisstic Aksi Demonstrasi Mahasiswa Dalam Prospek Demokrasi Indonesia*. 1, 2020. Retrieved <http://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium>
- Yuliani, W. (2018). *Quanta Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling*. 2(2). <https://doi.org/10.22460/q.v2i1p21-30.642>
- Zahra, A. A., Purnomo, E. P., & Kasiwi, A. N. (2020). New Democracy in Digital Era Through Social Media and News Online. *Humaniora*, 11(1), 13. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v11i1.6182>
- Ziraluo, M. (2020, Mei). Analisis Tindak Tutur Lokusi, Ilukusi, Dan Perlokusi Pada Debat Capres-Cawapres Republik Indonesia Tahun 2019. *Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, Vol 8 No 2, 249-256.